



**Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia
Tahun 2025**

No	Komponen	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30%	27.6
2	Pengukuran Kinerja	30%	27.6
3	Pelaporan Kinerja	15%	13.8
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	23
Predikat		AA	92

Catatan

A. Perencanaan Kinerja

1. Dokumen Renstra PPSDM belum ditandatangani oleh Kepala PPSDM.
2. Telah tersedia Renstra dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, namun belum terdapat penjelasan bahwa indikator kinerja telah memenuhi prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound).
3. Telah terdapat dokumen pendukung yang relevan, namun belum melampirkan SKP Tahun 2025.
4. Perlu dilampirkan data jumlah pegawai beserta jabatannya secara keseluruhan serta SKP seluruh pegawai.
5. Wawancara terkait pemahaman pegawai terhadap dokumen perencanaan kinerja dan komitmen dalam pencapaian tujuan organisasi belum mencakup seluruh pegawai.

B. Pengukuran Kinerja

1. Notula rapat belum disertai tanya jawab atau arahan pimpinan yang menunjukkan pembahasan terkait pengukuran capaian kinerja, bagaimana hal tersebut mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja serta penyesuaian aktivitas dan anggaran dalam mencapai kinerja.
2. Telah terdapat dokumen pendukung yang relevan, namun wawancara belum dilakukan kepada seluruh pegawai.

C. Pelaporan Kinerja

Telah terdapat dokumen pendukung yang relevan, namun pada laporan atau notula belum dijelaskan adanya tanya jawab dan arahan pimpinan yang menunjukkan bahwa laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai serta berpengaruh terhadap perubahan budaya organisasi.

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Telah terdapat dokumen pendukung yang relevan, namun belum dijelaskan adanya upaya pendalaman atau tindak lanjut hasil evaluasi yang telah dilakukan.

Rekomendasi

A. Perencanaan Kinerja

1. Dokumen *Renstra PPSDM* belum ditandatangani oleh Kepala PPSDM. Kondisi ini perlu segera ditindaklanjuti dengan melakukan penandatanganan resmi agar dokumen tersebut memiliki kekuatan hukum dan menjadi dasar perencanaan yang sah bagi organisasi.
2. Telah tersedia *Renstra* dan *Perjanjian Kinerja Tahun 2025*, namun belum terdapat penjelasan yang menunjukkan bahwa indikator kinerja telah memenuhi prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound).
3. Dokumen pendukung yang relevan telah tersedia, namun belum melampirkan *SKP Tahun 2025*. Oleh karena itu, perlu dilengkapi dengan SKP seluruh pegawai agar terjadi keterkaitan yang jelas antara kinerja individu dan sasaran organisasi.
4. Dokumen perencanaan juga belum memuat informasi mengenai jumlah pegawai beserta jabatannya secara keseluruhan serta SKP masing-masing. Diperlukan pelampiran data tersebut untuk memastikan keselarasan antara sumber daya manusia dengan target dan sasaran kinerja yang ditetapkan.
5. Wawancara terkait pemahaman pegawai terhadap dokumen perencanaan dan komitmen dalam pencapaian tujuan organisasi belum mencakup seluruh pegawai. Oleh karena itu, disarankan agar pelaksanaan wawancara dilakukan secara lebih luas agar pemahaman dan komitmen terhadap dokumen perencanaan merata di seluruh unit.

B. Pengukuran Kinerja

1. Di masa yang akan datang Notula rapat agar disertai tanya jawab atau arahan pimpinan yang menunjukkan pembahasan terkait pengukuran capaian kinerja, bagaimana hal tersebut mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja serta penyesuaian aktivitas dan anggaran dalam mencapai kinerja.
2. Wawancara terkait pelaksanaan pengukuran kinerja belum mencakup seluruh pegawai. Disarankan agar wawancara atau sosialisasi pengukuran kinerja dilakukan lebih luas, sehingga seluruh pegawai memahami peran dan tanggung jawabnya dalam proses pengukuran kinerja organisasi.

C. Pelaporan Kinerja

Meskipun telah tersedia dokumen pendukung yang relevan, dalam laporan atau notula belum dijelaskan adanya tanya jawab dan arahan pimpinan yang menunjukkan bahwa laporan kinerja telah menjadi perhatian dan kepedulian seluruh pegawai serta berpengaruh terhadap perubahan budaya kerja organisasi.

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Meskipun telah dilakukan evaluasi, belum dijelaskan secara rinci upaya pendalaman atau tindak lanjut yang telah dilakukan berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Oleh karena itu, perlu dibuat uraian mengenai tindak lanjut hasil evaluasi yang mencakup langkah-langkah perbaikan, inovasi yang dihasilkan, serta perubahan kebijakan atau strategi.



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Jakarta, 14 Desember 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh
Inspektur III

Masrul Latif



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**